



PENGANTAR

KEBIJAKAN PERIKANAN

(Harapan, Peluang, Tantangan Sekaligus Ancaman)

Studi Kasus Provinsi Kalimantan Utara

Dr. Asbar Iaga, S.T., M.Si.
Rukisah, Ph.D.
Dr. Ir. Muhamad Roem, S.Kel., M.Si.
Yulma, S.Pi., M.Si.

PENGANTAR KEBIJAKAN PERIKANAN

(Harapan, Peluang, Tantangan Sekaligus Ancaman)

Studi Kasus

Provinsi Kalimantan Utara

PENGANTAR KEBIJAKAN PERIKANAN

**(Harapan, Peluang, Tantangan Sekaligus Ancaman)
Studi Kasus Provinsi Kalimantan Utara**

**Dr. Asbar Iaga, S.T., M.Si.
Rukisah, Ph.D.
Dr. Ir. Muhamad Roem, S.Kel., M.Si.
Yulma, S.Pi., M.Si.**



PENGANTAR KEBIJAKAN PERIKANAN

(Harapan, Peluang, Tantangan Sekaligus Ancaman)

Studi Kasus Provinsi Kalimantan Utara

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Dr. Asbar Iaga, S.T., M.Si.

Rukisah, Ph.D.

Dr. Ir. Muhamad Roem, S.Kel., M.Si.

Yulma, S.Pi., M.Si.

Editor:

Erik Santoso

Cetakan Pertama: Mei 2023

Cover: Rusli

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I -: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023

Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-623-448-520-2

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Kegiatan Penyusunan PENGANTAR KEBIJAKAN PERIKANAN (Harapan, Peluang, Tantangan Sekaligus Ancaman) Studi Kasus Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengantar kebijakan bagaimana dalam mengelola kegiatan perikanan dengan mempertimbangkan analisis SWOT yang dilakukan.

Buku ini berisi mengupas mengenai analisis isu, arahan strategis dan program ada dinas perikanan dan kelautan. Buku ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian proses kajian secara keseluruhan. Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian Laporan Akhir ini.

Tarakan, Oktober 2021
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I KEBIJAKAN PERIKANAN	1
A. Konsep Dasar Program Perikanan.....	1
B. Tujuan Program Dasar Perikanan	4
C. Ruang Lingkup Program Perikanan.....	5
D. Substansi Teknis	6
BAB II PENDEKATAN <i>SYSTEM THINKING</i> DALAM	
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS.....	8
BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS	
KOMODITAS UNGGULAN PERIKANAN	10
A. Isu Strategis dan Prioritas Komoditas Udang Windu	
dan Ikan Bandeng	10
B. Isu Strategis dan Prioritas Komoditas Kepiting	
Bakau	15
C. Isu Strategis dan Prioritas Komoditas Rumput Laut....	17
BAB IV ANALISIS SWOT KEBIJAKAN PERIKANAN.....	19
A. Komponen Kekuatan (<i>Strength</i>).....	20
B. Komponen Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	22
C. Komponen Peluang (<i>Opportunity</i>).....	25
D. Komponen Ancaman (<i>Threat</i>).....	27

1. Problematika Budidaya Udang, bandeng dan Kepiting	30
2. Problematika Budidaya Rumput Laut	31
3. Peta Analisis Situasi (Stakeholder, Regulator, Operator, Peran dan Kewenangan)	31
4. Peta Analisis Peluang Optimasi Budidaya dan Multiplier effect.....	31
5. Formulasi/Konsepsi Solusi	31
BAB V ARAHAN STRATEGI KEBIJAKAN PERIKANAN	43
A. Strategi <i>Inward Looking</i>	54
B. Strategi <i>Outward Looking</i>	56
C. Pembagian Strategi Berdasarkan Sifatnya.....	59
BAB VI ARAHAN PROGRAM KEBIJAKAN PERIKANAN.....	73
A. Arahan Program Jangka Pendek.....	73
B. Arahan Program Jangka Menengah	77
C. Arahan Program Jangka Panjang	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komponen Kekuatan Komoditas Unggulan	
Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	20
Tabel 3.2 Komponen Kelemahan Komoditas Unggulan	
Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	23
Tabel 3.3 Komponen Peluang Komoditas Unggulan	
Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	25
Tabel 3.4 Komponen Ancaman Komoditas Unggulan	
Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	28
Tabel 4.1 Matriks Analisis SWOT Pengembangan	
Komoditas Unggulan Perikanan Provinsi	
Kalimantan Utara	44
Tabel 4.2 Strategi <i>Inward Looking</i> WO (<i>Weaknesses –</i>	
<i>Opportunity</i>)	54
Tabel 4.3 Strategi <i>Inward Looking</i> WT (<i>Weaknesses –</i>	
<i>Threat</i>)	56
Tabel 4.4 Strategi <i>Outward Looking</i> SO (<i>Strength –</i>	
<i>Opportunity</i>)	57
Tabel 4.5 Strategi <i>Outward Looking</i> ST (<i>Strength – Threat</i>)...	58
Tabel 4.6 Daftar alternatif strategi berikut penjelasan	
substansi dan muatan serta sifat strategi	59
Tabel 5.1 Arahan Program Jangka Pendek	74
Tabel 5.2 Arahan Program Jangka Menengah	78
Tabel 5.3 Arahan Program Jangka Panjang	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Analisis <i>System Thinking</i> komoditas Udang Windu di Kalimantan Utara	11
Gambar 2.2 Analisis System Thinking komoditas Ikan Bandeng di Kalimantan Utara	12
Gambar 2.3 Analisis System Thinking komoditas Kepiting di Kalimantan Utara	15
Gambar 2.4 Analisis System Thinking komoditas Kepiting di Kalimantan Utara	17
Gambar 3.1 Bagan alir proses analisis strategi pengembangan komoditas unggulan perikanan provinsi Kalimantan Utara	29



BAB I

KEBIJAKAN PERIKANAN

A. Konsep Dasar Program Perikanan

Secara nasional pembangunan perikanan budidaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2015-2019 bertujuan mewujudkan peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dengan arah kebijakan meliputi (1) Pengelolaan sistem kawasan dan kesehatan ikan; (2) Pengelolaan sistem perbenihan ikan; (3) Pengelolaan sistem produksi dan usaha; (4) Pengelolaan sistem pakan dan obat ikan dan (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas. Kinerja sektor budidaya pada periode tersebut menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Tahun 2020 merupakan momentum bagi masyarakat global dengan mewabahnya pandemi penyakit covid-19. Masa pandemi global ini pun memberikan pukulan telak bagi semua lini tak terkecuali akuakultur atau budidaya perikanan. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa awal pandemi covid-19, sempat membuat gelombang kepanikan di banyak sektor usaha. Industri pengolahan perikanan juga tidak luput dari dampak tersebut, ada yang sempat mengurangi dan bahkan menyetop produksinya. Hal tersebut memicu efek beruntun pada industri pendukungnya, salah satunya industri budidaya (tambak udang, bandeng dan rumput laut) serta industri perikanan tangkap sebagai pemasok bahan baku.

Respon pemerintah pusat dengan perumusan dan pemberlakuan skema new normal yang adaptif memberikan kesempatan industri pengolahan perikanan untuk bisa kembali aktif beroperasi. Perjalanan logistik yang sempat diperketat di awal-awal pandemi mendapat pengecualian bagi logistik pengangkut hasil perikanan. Dengan demikian pengiriman hasil panen untuk bahan baku pabrik bisa berjalan dengan new normal.

Produk komoditas unggulan perikanan Indonesia yang menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan di pasar ekspor antara lain udang, lobster, dan rumput laut. Provinsi Kalimantan Utara memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng. Secara nasional, nilai ekspor ketiga komoditas ini menunjukkan produktivitas dan permintaan pasar yang masih cukup baik. Oleh karena itu kinerja yang baik dari ketiga komoditas tersebut memerlukan dukungan untuk menopang perputaran ekonomi wilayah di Kalimantan Utara sebagai salah satu strategi pemulihan dan penguatan struktur ekonomi pasca pandemi. Hal ini didukung dengan fakta bahwa data ekspor udang Indonesia tahun 2020 berdasarkan data KKP menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Serapan pasar lokal yang menurun akibat pembatasan usaha menyebabkan peralihan pasar ke luar negeri sehingga nilai ekspor udang Indonesia mengalami kenaikan 35% di tahun 2020. Secara total komoditas udang berkontribusi pada kisaran 40% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Selain udang, volume ekspor tertinggi juga dicatatkan oleh rumput laut pada tahun 2019.

Berdasarkan trend data kinerja ekspor nasional dan kondisi eksisting usaha perikanan budidaya di Kalimantan Utara, nampak jelas bahwasanya pembangunan, investasi dan bisnis di sektor perikanan budidaya (*aquaculture*) dari hulu sampai hilir diproyeksikan tetap cerah (*bright, prospective*) pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu diperlukan kebijakan dan program pembangunan oleh pemerintah dalam mendongkrak kinerja subsektor perikanan budidaya yaitu **Revitalisasi, Ekstensifikasi, dan Diversifikasi**. Program revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan setiap unit usaha perikanan budidaya yang ada. Untuk tujuan itu diperlukan sebuah kebijakan perikanan sebagai upaya revitalisasi dan optimalisasi perikanan khususnya budidaya komoditas unggulan.

Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng dipilih sebagai komoditas dalam kajian ini berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain; (1) jumlah tenaga (lapangan) kerja eksisting yang terlibat dalam proses produksi maupun proyeksi lapangan kerja yang terbuka, (2) Luasan distribusi spasial lokasi sentra kegiatan/produksi pada 4 kabupaten Kota, (3) *multiplier effect* dari aktivitas produksi eksisting, dan (4) potensi dan kewenangan penanganan konflik aktifitas/lokasi budidaya terhadap peruntukan kawasan lain semisal Status Hutan pada budidaya Bandeng dan Udang Windu maupun penetrasi lokasi budidaya terhadap alur-alur pelayaran dan zona perikanan tangkap.

Dalam kerangka tersebut diperlukan konsep dan arahan sebagai pedoman dan/atau bahan rujukan bagi penyusunan program/kegiatan pengembangan kawasan budidaya

perikanan yang terencana, terpadu, ramah lingkungan, agar terjadi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Olehnya itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan kajian yang integratif dan terkoordinasi guna mengevaluasi komoditas Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng dalam upaya optimalisasi komoditas unggulan perikanan sebagai basis menuju terwujudnya industrialisasi perikanan.

B. Tujuan Program Dasar Perikanan

Maksud pelaksanaan Kebijakan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah terwujudnya strategi optimalisasi pengelolaan komoditas budidaya perikanan dalam hal ini Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng sebagai basis pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan Umum pelaksanaan Kebijakan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah melakukan inventarisasi dan analisis baik kuantitatif maupun kualitatif terhadap Komoditas Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng dalam rangka optimalisasi dan pengembangan industri perikanan secara terintegrasi, efisien, adaptif, berkualitas, berakselerasi tinggi dan menguntungkan bagi segenap stakeholder dalam bidang budidaya perikanan di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk dapat mencapai tujuan umum tersebut maka dirumuskan tujuan-tujuan khusus yang meliputi:

- a. Teridentifikasinya gambaran potensi, prospek, distribusi spasial, tingkat kuantitas produksi, kualitas produksi, sarana-prasarana dan permasalahan dalam pelaksanaan budidaya Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng eksisting di Provinsi Kalimantan Utara
- b. Tersedianya model proyeksi kebutuhan pengembangan komoditas gunaantisipasi dinamika dan kompetisi pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) serta fluktuasi nilai produksi dan nilai ekonomi komoditas perikanan budidaya.
- c. Terumuskannya keterkaitan antar unsur dalam pengembangan cluster (sentra) wilayah berbasis komoditas perikanan budidaya.
- d. Tersusunnya Kebijakan Perikanan konsep strategi pengembangan industri perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi, kualitas dan nilai ekonomi dari komoditas Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng.

C. Ruang Lingkup Program Perikanan

Lingkup wilayah penyusunan Kebijakan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara dengan fokus pada wilayah-wilayah pesisir yang berada pada wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki komoditas unggulan Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng.

Lingkup pekerjaan penyusunan Dokumen Kebijakan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian terhadap kebijakan di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota terkait sektor perikanan yang tertuang di dalam RZWP3K Provinsi dan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. Kajian terhadap kebijakan dan rencana lintas sektoral yang berkaitan dengan sektor perikanan khususnya terhadap 4 komoditas unggulan perikanan budidaya Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Ruang lingkup materi dan substansi pekerjaan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan upaya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya, yang antara lain mencakup dan tidak terbatas kepada substansi pembangunan keruangan kawasan pesisir, pembangunan sektor perikanan dan pembangunan sektor perekonomian.

D. Substansi Teknis

Substansi teknis dalam pekerjaan Penyusunan Dokumen Kebijakan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut

1. Pemahaman terhadap trend dan situasi aktual komoditas unggulan perikanan budidaya Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Udang Windu, Rumput Laut, Kepiting dan Bandeng.
2. Pemahaman terhadap situasi mendatang dalam konteks kebutuhan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pendukung, perbaikan metode budidaya

dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, nilai ekonomi, *multiplier effect* dari mata rantai aktivitas budidaya dan pasca-panen dari keempat komoditas perikanan Provinsi Kalimantan Utara

3. Pemahaman terhadap substansi pembangunan dan pengembangan empat komoditas unggulan yang melingkupi; konsepsi strategi pembangunan dan pengembangan dari aspek teknis budidaya, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi/bisnis.

BAB II

PENDEKATAN *SYSTEM THINKING* DALAM IDENTIFIKASI DAN ANALISIS

Sistem adalah suatu gugus dari elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem merupakan himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks yang mempunyai hubungan fungsional dan tujuan (Eriyatno, 1999). Sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang satu sama lain saling terkait, mulai dari subsistem input, subsistem produksi, subsistem pemasaran, subsistem pengolahan dan subsistem penunjang. Oleh karena itu dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam sistem agribisnis dapat digunakan konsep berpikir sistem (*system thinking*).

Saat ini dalam dunia nyata banyak permasalahan yang kompleks dan beragam sehingga penyelesaiannya tidak mungkin dapat berhasil diselesaikan oleh satu atau dua metode spesifik saja. Oleh karena itu diperlukan pendekatan sistem (*system approach*). Dalam teori sistem dinyatakan bahwa kesisteman adalah suatu meta disiplin, dimana proses dari keseluruhan disiplin ilmu dan pengetahuan sosial dapat dipadukan dengan baik (Gigh dan Carnavayal dalam Eriyatno,1999).

Telah disadari bahwa keutamaan pendekatan sistem adalah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

kompleks yang sulit diselesaikan dengan pendekatan lainnya. Seperti dinyatakan oleh Chechland (1981) bahwa System Thinking muncul akibat dari reaksi terhadap ketidakmampuan Natural Science dalam memecahkan permasalahan dunia nyata yang kompleks. Selanjutnya Manetsch dan Park (1977) berpendapat bahwa untuk permasalahan multidisiplin yang kompleks pendekatan sistem memberikan penyelesaian masalah dengan baik.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa systems thinking merupakan gambaran sesuatu secara menyeluruh dan mempunyai keterkaitan diantara variabel, maka hasil dari suatu proses systems thinking dapat digambarkan dalam suatu model. Model adalah suatu pengganti dari suatu objek atau sistem. Nadler *et al.* (1982), merumuskan model sebagai kerangka kerja, skema yang teratur atau peta jalan yang dapat membantu kita memahami dan meramalkan perilaku sistem. Metodologi pemodelan sistem, mempelajari cara-cara yang digunakan untuk memperlakukan aspek dinamis dan kompleks dari suatu sistem.

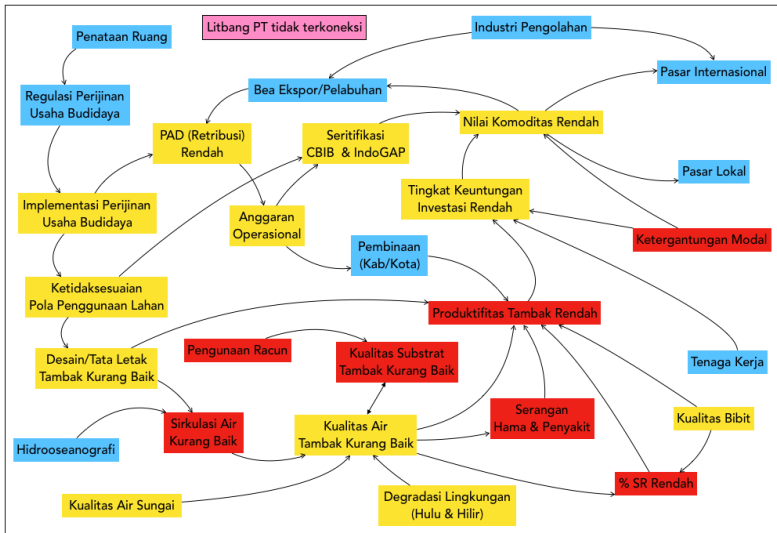
BAB III

ANALISIS ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS KOMODITAS UNGGULAN PERIKANAN

Hasil pemikiran dalam systems thinking dengan wujud nyata model diagram perlu mendapatkan pengujian yang dilakukan oleh para pakar. Proses ini telah dilakukan oleh tim penyusun dan memerlukan input tambahan serta pembandingan dari stakeholder khususnya dinas teknis perikanan di provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Kegiatan terfasilitasi dalam *Focus Discussion Group* (FGD). Pada umumnya team learning ini terdiri dari para pakar dan praktisi. Inti analisis dalam kegiatan ini sesungguhnya adalah expert judgment dalam hal ini tim penyusun bersama-sama dengan perwakilan instansi teknis.

A. Isu Strategis dan Prioritas Komoditas Udang Windu dan Ikan Bandeng

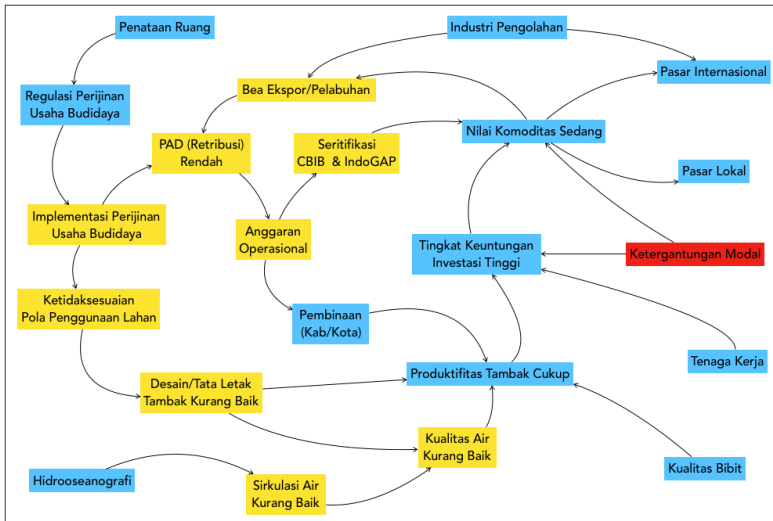
Berikut disajikan diagram Analisis System Thinking terhadap komoditas Udang Windu di Kalimantan Utara.



Gambar 2.1 Analisis *System Thinking* komoditas Udang Windu di Kalimantan Utara
Sumber : Analisis Tim

Komoditas Udang windu dan bandeng dibudidayakan dalam sistem polikultur dimana dalam satu petakan yang sama, kedua jenis dipelihara bersamaan. Analisis kedua komoditas dilakukan terpisah namun beberapa bagian dari problematika beririsan antara kedua komoditas. Dengan demikian maka untuk meminimalkan redundansi analisis, maka uraian analisis keduanya disatukan dalam satu narasi.

Adapun diagram Analisis System Thinking terhadap komoditas Ikan Bandeng di Kalimantan Utara disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Analisis System Thinking komoditas Ikan Bandeng di Kalimantan Utara
Sumber : Analisis Tim

Pada hakikatnya terdapat 3 domain utama dalam sistem budidaya komoditas udang windu yakni; (1) Hatchery (pembenihan), (2) Pembesaran/Tambak dan (3) Cold Storage/Industri). Persoalan dan problematika komoditas udang windu dapat dilacak pada ketiga komponen. Pada aspek Hatchery, 70% Bibit Udang Windu di Kalimantan Utara berasal dari Luar. Tidak bibit yang dihasilkan berasal dari hatchery terstandar atau usaha yang sifatnya backyard. Jarak tempuh yang jauh dari Jawa diduga menurunkan kualitas/daya tahan bibit. Dari sisi kematangan benih, perlu transparansi usia bibit (PL 14+). Dalam fase metamorfosis larva udang, secara morfologi tidak ada perbedaan organ, bentuk dan ukuran antara larva PL 9 sampai PL 14. Perbedaan adalah pada tingkat kematangan metamorfosis yang berimplikasi pada tingkat kesiapan benih untuk ditabur

dan tingkat kelolosan hidup (% *Survival Rate*). Hal ini dapat diatasi dengan perpanjangan masa pendederan (jamin lewat PL 14), perpendek masa pemeliharaan dan perkuat pakan.

Pada aspek pemeliharaan kondisi tambak pada umumnya memiliki persoalan yang bersifat kronis. Dampak pembukaan lahan mangrove secara ekstensif di masa awal pembudidayaan ditengarai menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Mangrove memiliki peran sebagai ekosistem yang menjaga kualitas air dan diwaktu yang bersamaan menjadi habitat alami udang windu. Sejak awal pembukaan lahan tambak pada tahun 90an telah mengindikasikan ketidakpatuhan pada aturan sempadan pantai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Perlindungan Lingkungan. Keppres tersebut mensyaratkan lebar sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Berikutnya aktivitas pertambangan pada daerah hulu yang dimulai awal 2000-an menyebabkan peningkatan leaching bahan pencemar yang terangkut sungai menuju pesisir. Kondisi mangrove di pesisir yang telah berkurang ditengarai menyebabkan penurunan kapasitas asimilasi perairan terhadap bahan pencemar.

Kondisi lingkungan yang menurun tersebut berkelindan dengan desain tata letak tambak. Model tambak ekstensif yang luas dan mengandalkan satu pintu menyebabkan tidak semua sisa metabolisme organisme budidaya yang berada di dasar perairan dapat tercuci oleh pergantian air. Selain itu, penggunaan Thiodan yang diharapkan membunuh organisme penyebab penyakit dan predator (Ikan Berkus) juga menyebabkan kemusnahan pada organisme yang bersifat mendukung produktivitas tambak. Dalam hal ini

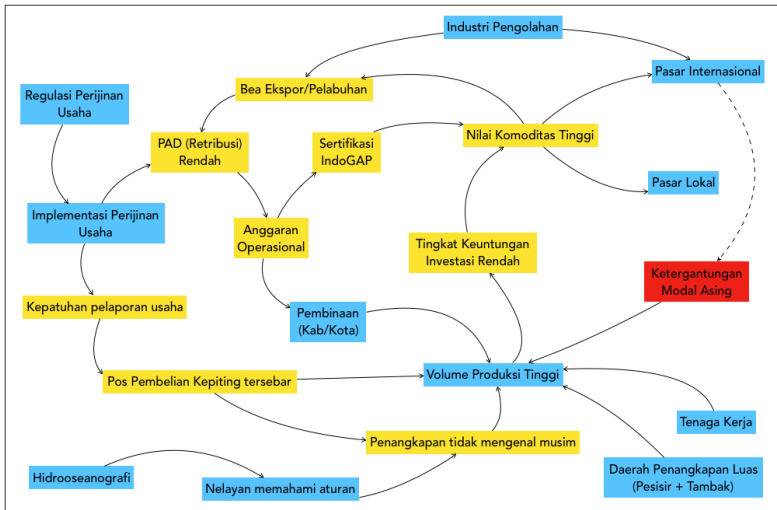
mikroorganisme yang bersifat pengurai limbah organik dan organisme alga yang menjadi makanan alami udang windu di dasar perairan.

Dari aspek industri cold storage yang tidak sepenuhnya transparan terhadap penentuan harga menyebabkan kecurigaan pembudidaya terhadap praktik oligarki oleh industri pengolahan dan *cold storage*. Di sisi lain banyak pembudidaya yang terlibat dalam hutang untuk modal usaha. Hal ini berakibat meskipun harga tinggi akan tetapi potongan komisi (hutang) yang juga tinggi menyebabkan nilai rupiah yang diterima pembudidaya rendah. Untuk menutupi hal tersebut, maka pembudidaya membuat utang baru.

Untuk komoditas Ikan Bandeng cenderung tidak memiliki kendala secara teknis. Pembudidayaan udang windu dan ikan bandeng bersifat polikultur oleh karena itu dapat dipastikan permasalahan pada aspek permodalan usaha. Dari sisi produksi, volume produksi Ikan bandeng Persoalannya adalah pada tingkat produksi yang belum mampu memenuhi permintaan pasar.

B. Isu Strategis dan Prioritas Komoditas Kepiting Bakau

Adapun diagram Analisis System Thinking terhadap komoditas Ikan Bandeng di Kalimantan Utara disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Analisis System Thinking komoditas Kepiting di Kalimantan Utara

Sumber : Analisis Tim

Berdasarkan penelusuran lapangan, mayoritas kepiting Kalimantan Utara merupakan hasil tangkapan baik di pesisir maupun tambak-tambak sebagai *by product* dari usaha pembudidayaan Udang Windu dan Ikan Bandeng. Belum tersedia hatchery khusus kepiting yang berhasil memproduksi crablet dalam jumlah massal. Hatchery diperlukan untuk restocking benih kepiting (*recruitment*) dalam rangka mengimbangi laju penangkapan di alam.

Dari aspek habitat diperlukan kawasan-kawasan lindung sebagai lokasi restocking. Lokasi kawasan sebaiknya tersebar merata pada beberapa wilayah agar proses spillover kepiting yang memenuhi ukuran minimal penangkapan dapat berlangsung lebih optimal.

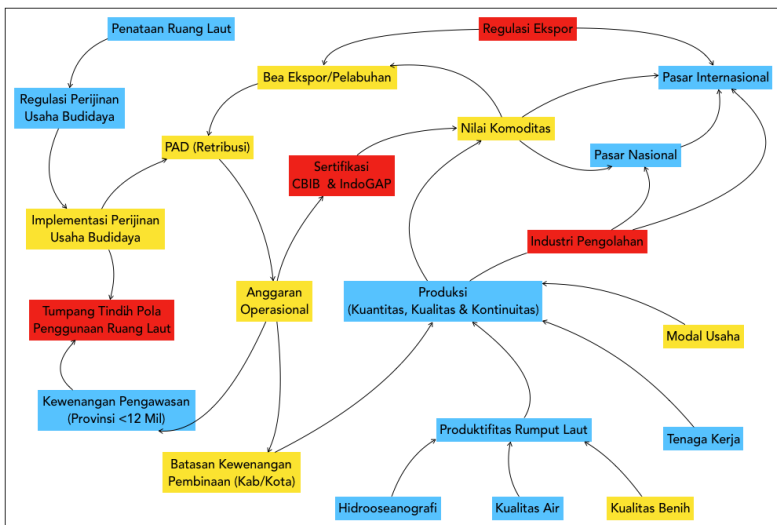
Dari aspek regulasi perlu penetapan kuota penangkapan dan ekspor kepiting oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Kepmen KP 20 Tahun 2017 Kuota Kepiting di WPP 716 termasuk Kalimantan Utara sebesar 2.196 Ton dengan JTB (Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan) mencapai 1.756 Ton dan tingkat pemanfaatan 0,38. Provinsi dalam hal ini perlu melakukan penetapan kuota penangkapan dengan terlebih dahulu melakukan validasi seberapa besar potensi aktual kepiting Kalimantan Utara. Sebab fakta menunjukkan bahwa sebagian kepiting yang dipasarkan ke Tawau oleh pengusaha di Tarakan juga didatangkan dari Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau. Untuk itu perlu validasi seberapa besar potensi kepiting di Kalimantan Utara sebagai dasar penentuan kuota penangkapan (JTB). Kuota Kepiting dapat dialokasikan oleh daerah karena habitatnya berada di bawah 12 Mil.

Regulasi juga perlu menyentuh sisi perdagangan antar negara dikarenakan regulasi impor dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Selama ini komoditas kepiting yang dipasarkan ke Tawau sebagian telah memiliki dokumen kelengkapan ekspor, sementara sebagian lainnya tidak tercatat dan tidak memberikan kontribusi pemasukan kepada daerah. Dengan adanya regulasi yang memfasilitasi ekspor secara legal, maka tidak ada kekhawatiran pengusaha

terhadap aspek legalitas aktivitas ekspornya, khususnya pungutan liar yang dialami pengusaha. Sementara daerah mendapatkan pemasukan dari biaya yang ditetapkan secara resmi.

C. Isu Strategis dan Prioritas Komoditas Rumput Laut

Adapun diagram Analisis System Thinking terhadap komoditas Rumput Laut di Kalimantan Utara disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Analisis System Thinking komoditas Kepiting di Kalimantan Utara

Sumber : Analisis Tim

Rumput laut merupakan komoditas dengan tingkat pertumbuhan lahan budidaya yang sangat massif. Besarnya permintaan pasar terhadap komoditas ini telah menyebabkan perubahan signifikan pada pola penggunaan ruang laut di

Sekitar Tarakan dan Nunukan. Permasalahan yang terjadi berakar dari implementasi perizinan dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Dinas Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan hanya memiliki kewenangan pembinaan pada sisi darat tanpa kewenangan pengawasan terlebih penindakan pada sisi laut. Akibatnya penggunaan lahan untuk budidaya rumput laut tanpa memiliki izin.

Tidak adanya izin menyebabkan budidaya rumput laut secara hukum masuk dalam kategori aktivitas ilegal. Melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Provinsi telah mengatur retribusi sebesar Rp 50.000/ha/tahun untuk usaha rumput laut. Namun implementasi Perda tidak dapat berjalan karena keterbatasan SDM dan Alat operasional. Ketiadaan retribusi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan hilangnya pendapatan daerah. Guna mencegah itu maka pemerintah provinsi baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah 12 tahun 2019 tersebut.

BAB IV

ANALISIS SWOT KEBIJAKAN PERIKANAN

Kajian kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang lebih dikenal dengan istilah analisa SWOT pada kegiatan ini akan menjadi alat analisis untuk menentukan arahan strategi program dan rencana tindak bagi pengembangan komoditas unggulan perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Analisis SWOT dalam penyusunan Kebijakan Perikanan melingkupi Aspek Produksi Komoditas Unggulan, Aspek Perdagangan Komoditas Baik Domestik maupun Ekspor, Aspek Daya Dukung Ekologi/Lingkungan Pesisir serta Aspek Kebijakan, ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor internal yang dimiliki yang terdiri atas Kekuatan dan Kelemahan juga faktor eksternal yang terdiri dari Peluang dan Ancaman.

Dari analisa matrik SWOT pada kajian seluruh aspek dihasilkan strategi Internal dari perspektif kekuatan yaitu dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dari luar (S-O), kemudian perspektif kelemahan yaitu memperbaiki kelemahan yang ada dengan mengambil keuntungan dari peluang dari luar (W-O), selain strategi secara internal dalam SWOT juga dihasilkan strategi eksternal yaitu dengan menggunakan Kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal (S-T), dan memperbaiki kelemahan yang ada untuk menghindari ancaman dari luar (W-T)